

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Dipilihnya metode penelitian *yuridis normatif* dilatar belakangi oleh sasaran penelitian, yaitu analisis peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga peraturan lain yang menyangkut bahan kajian. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian *yuridis normatif*, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute approach* merupakan metode dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian.⁵⁸

B. Jenis dan Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu),

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2007, hal.302.

Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).⁵⁹ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- a. Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Literatur berupa buku-buku yang berisi teori-teori dan pendapat ahli hukum;
- c. Karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi dan laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian;
- d. Artikel dalam jurnal hukum di internet, dan lain-lain.

⁵⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hal.295.

⁶⁰ *Ibid*, hal.296.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.⁶¹ Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia dan Inggris, dan lain-lain

Ketiga bahan hukum tersebut kemudian ditunjang oleh pengayakan bahan hukum yaitu dengan Studi dokumen

C. Teknik Analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif maksudnya penganalisisan data yang diperoleh dari hasil penelitian bahan hukum diolah dan disusun secara sistematis dan diuraikan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang obyek penelitian. Sedangkan kualitatif maksudnya data yang diperoleh dari hasil penelitian dipisah-pisahkan, diambil yang memiliki relevansi dengan permasalahan untuk kemudian dikaji lebih lanjut dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi ini.

⁶¹ *Ibid*

D. Definisi Konseptual

1. Internet adalah jaringan global komputer dunia, besar dan sangat luas dimana setiap komputer saling terhubung satu sama lain dari negara ke negara lainnya di seluruh dunia dan berisi berbagai macam-macam informasi, mulai dari text, gambar, audio, video, dan lain sebagainya.
2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Transaksi Elektronik sendiri adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
4. *Cyber crime* adalah Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.
5. *Spamming* adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik (termasuk media penyiaran dan sistem pengiriman digital) untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal, bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh penerimanya.